

ABSTRAK

Aksi Ekshibisionisme Menurut Hukum Positif Indonesia

Oleh : Dhea Putri Shidawati

Dosen Pembimbing Utama : Sutrisni, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Ekshibisionisme merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan adanya kecenderungan untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan hal-hal yang tidak senonoh seperti alat kelamin kepada lawan jenis di muka umum. Mayoritas pengidap gangguan ekshibisionisme ini adalah laki-laki dan korbannya wanita. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban aksi ekshibisionisme menurut Hukum Positif Indonesia dan bagaimana upaya penanggulangan pemerintah untuk menangani aksi ekshibisionisme. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah menganalisis bagaimana pertanggungjawaban aksi ekshibisionisme menurut Hukum Positif Indonesia dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan pemerintah untuk menangani aksi ekshibisionisme. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan masalah perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian Teknik penelusuran bahan hukumnya dengan studi kepustakaan dan Teknis analisis bahan hukumnya menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, teknik preskriptif dan teknik deduktif.

Dalam tinjauan pustaka ada dua kata kunci yang dibahas yaitu ekshibisionisme dan hukum positif.

Bentuk pertanggungjawaban aksi ekshibisionisme menurut Hukum Positif Indonesia yaitu berupa aturan tertulis dan tidak tertulis. Upaya pemerintah untuk menanggulangi aksi ekshibisionisme ini bisa dari pihak kepolisian dan dari segi psikologinya.

Aksi Ekshibisionisme tidak dapat dikenakan pidana meski terdapat aturan tertulis yang mengatur tentang ekshibisionisme, dikarenakan masuk dalam kategori gangguan jiwa. Maka kedepannya aturan hukum di Indonesia harus lebih diperjelas mengenai aksi ekshibisionisme ini agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam menyelesaikan kasus ekshibisionisme. Kemudian masyarakat untuk lebih menambah pengetahuan hukum terutama tentang kejahatan seksual sehingga dapat berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar.

Kata Kunci : *Eksibisionisme dan Hukum Positif*

ABSTRACT

Exhibitionist Actions According to Indonesian Positive Law

By : Dhea Putri Shidawati

Main Supervisor : Sutrisni, S.H., M.H.

Companion Supervisor : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Exhibitionism is a mental disorder characterized by a tendency to show or display obscene matters such as genitals to the opposite sex in public. The majority of people with this exhibitionism disorder are male and female victims. The formulation of the problem in the writing of this thesis is how the responsibility of exhibitionism according to Indonesian Positive Law and how the government's handling efforts to deal with exhibitionism. The objectives to be achieved in writing this thesis are to analyze how the responsibility of exhibitionism according to Indonesian Positive Laws and to find out how to overcome the government's efforts to deal with exhibitionism. The research method in writing this thesis is to use a type of normative research with a problem approach to legislation. Types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the technique of tracing the legal material with the study of literature and technical analysis of legal materials using qualitative normative analysis techniques, prescriptive techniques and deductive techniques.

In the literature review there are two key words discussed namely exhibitionism and positive law.

The form of accountability for exhibitionism according to Indonesian Positive Law is in the form of written and unwritten rules. Government efforts to tackle the exhibitionism can be from the police and psychology.

Exhibitionism cannot be subject to criminal sanctions even though there are written rules governing exhibitionism, because they fall into the category of mental disorders. So in the future the rule of law in Indonesia must be clarified more about this exhibitionism action so that law enforcement officers are more careful in resolving exhibitionism cases. Then the community to add more legal knowledge, especially about sexual crimes so they can be careful of the people around.

Keywords: *Exhibitionism* and *Positive Law*